

**IMPLEMENTASI PROGRAM GEBYAR PEMBANGUNAN DESA DALAM
INFRASTRUKTUR DESA**

(Studi Pada Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

ANITA SUPRIHATIN

1831040042



Prodi :Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022M**

**IMPLEMENTASI PROGRAM GEBYAR PEMBANGUNAN DESA DALAM
INFRASTRUKTUR DESA**
(Studi Pada Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh:
ANITA SUPRIHATIN

NPM 1831040042

Prodi :Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si
Pembimbing II : Gesit Yudha, M.I.P

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022M**

ABSTRAK

Pentingnya pembangunan yang menyentuh desa serta aspek kehidupan masyarakatnya, menempatkan pemerintah dengan kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan di tingkat desa. Pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat dan kemakmuran masyarakat. Namun yang terjadi di Desa Pekurun belum memiliki infrastruktur yang memadai seperti belum adanya infrastruktur saluran drainase, sumur bor, gedung posyandu dan infrastruktur penting lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program gebyar pembangunan desa dalam infrastruktur desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menggunakan pendekatan teori Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu maupun dalam kelompok dan pejabat-pejabat pemerintah swasta yang di tujukan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah di tentukan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan, mereka menekankan bahwa tahapan implementasi baru terjadi selama proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya, dana yang telah disepakati tidak pada saat dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi.

Hasil penelitian pelaksanaan pembangunan desa di Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara tidak berjalan sesuai dengan yang telah di targetkan. Target penyelesaian pembangunan infrastruktur Desa Pekurun pada awal tahun 2021 namun sampai akhir tahun 2021 pembanguan belum terselesaikan. Pada pembangunan desa ini seharusnya mendahulukan pembangunan fasilitas prioritas yang memang penting didahulukan yaitu pembuatan saluran drainase, namun malah terjadi kesalahan pada pelaksanaan pembangunannya malah terlebih dahulu membangun infrastruktur yang tidak di prioritaskan seperti lapangan futsal, lapangan volly, dan lapangan badminton. Faktor penghambat dalam pembangunan desa di Desa Pekurun ini disebabkan karena kurangnya pendanaan yang di salurkan dari pemerintah daerah ke desa ini, sehingga pembangunan yang telah direncanakan terhambat. Adapun sumber dana yang didapatkan adalah dari ADD, PAD, dan bantuan dari pemerintah daerah provinsi dengan pengajuan proposal. Kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya partisipasi dari masyarakat juga keterbatasan sumber daya manusia menghambat pelaksanaan program gebyar pembangunan Desa Pekurun tidak berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Implementasi, Pembangunan, Infrastruktur

ABSTRACT

The importance of development that touches the village and the lives of its people, places the government with the obligation to carry out development at the village level. Village infrastructure development is carried out for the benefit of the community and the prosperity of the community. However, what happened in Pekurun Village did not yet have adequate infrastructure such as the absence of infrastructure for drainage channels, drilled wells, posyandu buildings and other important infrastructure. This study aims to determine the level of succes of the implementation of the village infrastructure.

This study uses a qualitative approach with a descriptive type of reseach. Data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. The results of the study using the Van Meter and Van Horn theoretical approach that the implementation of an action that will be carried out both individually and ini group and private government officials whose goal is to achieve the goals that have been determined by a policy dicision, they emphasize that the implementation stage has just occurred as long as the legitimacy procces, the agreed funds are not started when the goals and objectivives of public policies are set, but the implementation stage.

From the results of the research, the implementation of village development in Pekurun Village, Abung Pekurun District, Nort Lampung Regency did not go according to what had been targeted. The target for the completion of the Pekurun Village infrastructure development is in early 2021, but until the end of 2021 the development of this village, the construction of priority facilities should prioritize the implementation of the construction, instead building infrastructure that was not prioritized, such as futsal courts, volleyball courts, and badminton courts. The inhibiting factor in village is due to the lack of funding channeled from the local government to this village, so that the planned development is hampered. The sources of funds obtained are from ADD, PAD, and assistance from the frovincial government by submitting proposals. Lack of facilities and infrastructure, lack of participation from the community as well as limited human resources hampered the implementation of the Pekurun Village development celebration proram that did not run optimally.

Keyword: Implementation, Development, Infrastructure

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Anita Suprihatin
NPM : 1831040042
Program Studi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ***“Implementasi Program Gebyar Pembangunan Desa Dalam Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara)”*** adalah benar-benar hasil karya penelitian sendiri, bukan duplikasi atau saluran dari karya orang lain kecuali beberapa bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terdapat penyimpangan dari karya ini maka sepenuhnya tanggung jawab peneliti.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta dengan penuh kesadaran, untuk itu agar dapat dimaklumi.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 14 Desember 2022



Anita Suprihatin



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Judul skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM GEBYAR
PEMBANGUNAN DESA DALAM
INFRASTRUKTUR DESA**
(Studi Pada Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun
Kabupaten Lampung Utara)

Nama : **Anita Suprihatin**
NPM : **1831040042**
Jurusan : **Pemikiran Politik Islam**
Fakultas : **Ushuluddin dan Studi Agama**

MENYETUJUI

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si

NIP. 197503172003121003

Gesit Yudha, M.I.P

NIP.-

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam

Abd Qohar, M.Si

NIP. 197106122005011005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM GEBYAR PEMBANGUNAN DESA DALAM INFRASTRUKTUR DESA (Studi Pada Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara)”**. Disusun oleh **Anita Suprihatin, NPM: 1831040042**, Jurusan **Pemikiran Politik Islam**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, pada hari/tanggal: **Kamis, 22, Desember 2022** pukul **13:00-14:30 WIB**.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Drs. A. Zaeny, M. Kom. I 

Sekretaris : Dwi Rosmawati, S. Tr. M. Kes 

Pembahas Utama : Abd. Qohar, M. Si 

Pembahas I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M. Si 

Pembahas II : Gesit Yudha, M. I. p 

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**



**Dr. Ahmad Isnaeni, MA
NIP. 197403302000031001**

MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وُخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia
dijadikan bersifat lemah”

(Q.S. An-Nisa : 28)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Esa dan atas takdir segala nikmat yang-Kau berikan *Alhamdulillahirobbilalamiin* rasa penuh syukur yang tak ada hentinya ku panjatkan pada-Mu, kau jadikan aku seorang insan yang selalu senantiasa berusaha, berfikir, dan beriman kepada-Mu, serta selalu diberikan kesabaran untuk terus berusaha dan menjalankan kehidupan ini. Skripsi ini akan ku persembahkan untuk orang terdekat yang telah berjasa dan memberikan motivasi serta dukungan selama peneliti menuntut ilmu:

1. Teruntuk kedua orangtuaku, Bapak Ahmad Karyo (Alm) dan Ibu Natun yang sangat berjasa dalam hidupku terutama ibuku yang sedari aku kecil berjuang sendiri untuk masa depanku, terimakasih atas segala cinta kasih sayang yang tak terhingga, doa, pengorbanan, jerih payah dan dukungan yang selalu diberikan hingga terselesainya skripsi ini. Terimakasih mungkin tidaklah cukup untuk membalas semua namun doa selalu diriku panjatkan pada Allah SWT untuk senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan keberkahan umur, serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan dan yang telah memberikan pengalaman yang begitu berharga.

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Anita Suprihatin lahir pada 11 April 2000 di Pacitan Jawa Timur. Peneliti merupakan anak tunggal dari Bapak Ahmad Karyo dan Ibu Natun.

Peneliti memulai menempuh pendidikan formal di SDN 2 Pekurun Udik, Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Abung Pekurun Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara dan lulus pada tahun 2015. Lalu melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Abung Pekurun Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara dan lulus pada tahun 2018.

Kemudian pada tahun 2018, peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri yaitu UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama-Agama pada Program Studi Pemikiran Politik Islam, untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Maka peneliti menyusun skripsi dengan judul “Implementasi Program Gebyar Pembangunan Desa Dalam Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara)” semoga ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dilingkungan masyarakat.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Gebyar Pembangunan Desa Dalam Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara)”, dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) UIN Raden Intan Lampung. Sholawat teriring salam selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak, Aamiin ya robbal alamiin.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih banyak kekeliruan dan kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini, peneliti ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Abdul Qohar, M.SI. selaku Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Citra Wahyuni, M.SI. selaku Sekretaris Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Bapak Ali Abdul Wakhid, M.SI. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Gesit Yudha, M.I.P selaku Dosen Pembimbing II dengan penuh keikhlasan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Khususnya Program Studi Pemikiran Politik Islam.
7. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang memperkenankan peneliti literatur penelitian skripsi ini.

8. Seluruh keluarga yang mendukung serta memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Wisnu Ariyono, M. Malik Rizky Sauda, Niken Rahmawati yang selalu mensupport juga sebagai mentor dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-Teman PPI angkatan 2018, yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan bersedia menjadi teman diskusi bertukar pikiran selama dibangku perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kelimpahan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 14 Desember 2022

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	13
I. Kerangka Teoritik.....	25
BAB II IMPLENTASI, PEMBANGUNAN DESA, INFRASTRUKTUR DESA	
A. Implementasi	27
1. Pengertian Implementasi	27
2. Indikator Implementasi.....	28
B. Pembangunan Desa	33
1. Pengertian Pembangunan Desa.....	33
2. Indikator Pembangunan Desa	36
C. Pemerintah Desa.....	40
1. Pengertian Pemerintah Desa	40
2. Indikator Pemerintah Desa	44

D. Infrastruktur Desa.....	47
1. Pengertian Infrastruktur Desa	47
2. Indikator Infrastruktur	48

**BAB III GAMBARAN UMUM DESA PEKURUN
KECAMATAN ABUNG PEKURUN KABUPATEN
LAMPUNG UTARA**

A. Sejarah Singkat Desa Pekurun.....	51
B. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Pekurun	51
1. Potensi Umum	51
2. Luas Desa dan Wilayah Menurut Penggunaan	51
3. Orbitasi	52
4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian.....	53
5. Jumlah Perangkat Desa.....	53
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.....	53
7. Keadaan Pemerintah Desa/Perangkat Desa	54
8. Kepala Dusun Desa Pekurun	54
9. Sarana dan Prasarana	54
C. Visi Misi Desa Pekurun.....	55

**BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM GEBYAR
PEMBANGUNAN DESA DALAM INFRASTRUKTUR
DESA**

A. Tingkat Keberhasilan Program Gebyar Pembanguna Desa Dalam Infrastruktur Desa	57
B. Faktor Penghambat Implementasi Program Gebyar Pembangunan Desa Dalam Infrastruktur Desa	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Rekomendasi	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.A Daftar Infrastruktur Desa Pekurun	8
Tabel 1.B Data Primer	18
Tabel 1.C Data Dokumentasi	21
Tabel 1.D Data Potensi Desa Pekurun	51
Tabel 1.E Data Penduduk Menurut Pendidikan	52
Tabel 1.F Data Perincian Pendidikan Desa Pekurun Berdasarkan Tingkat Pendidikan Aparat	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Teoritik	25
Gambar 1.2 Wawancara Dengan Kepala Desa.....	119
Gambar 1.3 Wawancara Dengan Sekretaris Desa	119
Gambar 1.4 Wawancara Dengan Kasi Pembangunan	120
Gambar 1.5 Wawancara Dengan Warga Desa Pekurun	120
Gambar 1.6 Wawancara Dengan Kasi Keuangan	121
Gambar 1.7 Lapangan Futsal Desa Pekurun	122
Gambar 1.8 Lapangan Volly Desa Pekurun	122
Gambar 1.9 Lapangan Badminton Desa Pekurun	123
Gambar 1.10 Gedung Posyandu Desa Pekurun.....	124
Gambar 1.11 Sumur Bor Belum Terselamatkan	124
Gambar 1.12 Jalan Rusak Tanpa Drainase.....	125



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Pedoman Wawancara
2. Lampiran Transkrip Wawancara
3. Dokumentasi
4. Surat Izin Penelitian
5. Daftar Hadir Munaqosah
6. Surat Keterangan Cek Turnitin
7. SK Judul



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Langkah utama guna mengetahui skripsi ini serta mencegah kemungkinan kesalahpahaman dan ambiguitas dalam arti dan istilah yang digunakan saat menulis judul skripsi ini, penulis menganggap perlu guna mengkonfirmasi judul istilah yang terkandung dalam judul penelitian. Judul skripsi ialah **“Implementasi Program Gebyar Pembangunan Desa Dalam Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara)”**. Penulis menggunakan istilah dalam judul yaitu:

Implementasi merupakan sebuah kegiatan ataupun penyelenggaraan mengenai suatu agenda yang telah disusun secara cermat dan terperinci. Implementasi umumnya dianggap sempurna setelah persiapan. Nurudin Usman mengatakan, Implementasi ialah kegiatan ataupun terdapat metode yang sistematis. Implementasi tidak cuma sekedar aktivitas, melainkan tindakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹

Pembangunan pedesaan merupakan usaha untuk menaikkan taraf hidup serta penghidupan masyarakat pedesaan.² Ali Hanapiah Muhi menyatakan, pembangunan desa meliputi seluruh tatanan kegiatan warga (masyarakat dan pemerintah) di desa untuk mengembangkan orang, kelompok, rakyat serta wilayah di desa seperti fisik, ekonomi, sosial, budaya maupun politik, ketertiban. Pertahanan serta keamanan, agama serta negara, yang dilaksanakan sesuai rencana serta berdampak baik bagi kemajuan desa.³

¹Nurudin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002). Hlm. 70

² Permendesa dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, “Pasal 1 Ayat 9,” n.d.

³Devi Desmiwar, *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan* (Riau: UIN Syarif Kasim, 2019). Hlm. 44

Pembangunan Infrastruktur ialah sebuah upaya atau kombinasi dari upaya perkembangan serta transformasi yang direncanakan guna mengembangkan infrastruktur maupun segala sesuatu yang memberikan dukungan istimewa bagi terselenggaranya sistem pembangunan.⁴

Menurut Asnudin Andi, Infrastruktur Pedesaan adalah infrastruktur yang bersifat fisik serta menyediakan akses bantuan fondasi, kemasyarakatan dan perniagaan warga desa. Secara global, pentingnya infrastruktur sering dihubungkan melalui pembangunan fasilitas dasar guna kebutuhan bersama. Beberapa contoh infrastruktur dalam bentuk fisik adalah jalan, jalan tol, stadion, jembatan, fasilitas konstruksi, jaringan listrik, bendungan, dll. Lebih jauh, pentingnya infrastruktur bukan hanya soal fisik. Tetapi juga pelayanan non fisik, seperti pelayanan masyarakat.⁵

Berdasarkan penjelasan istilah dari “Implementasi Program Gebyar Pembangunan Desa Terhadap Infrastruktur Desa” bahwasanya Implementasi program gebyar pembangunan desa yang akan di bahas adalah terkait pelaksanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan apa yang di rencanakan dalam musyawarah desa. Dalam musyawarah desa, masyarakat mensepakati pembangunan berbasis fasilitas umum diantaranya gedung posyandu, sumur bor, saluran drainase, lapangan voly, lapangan futsal, dan lapangan badminton. Pada kenyataannya, pembangunan belum terlaksana, namun pembangunan yang bukan skala prioritas umum cenderung di dahulukan. Jadi substansi yang dapat dilihat dari permasalahan yang ada bahwa di adakan program gebyar pembangunan desa ini belum bisa dikatakan efektif terlihat dari permasalahan yang di paparkan diatas.

⁴Oktoriani, “Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau (Studi Komparatif Antara Desa Long Nawang Dan Desa Nawang Baru),” *Jurnal Pemerintahan Integratif* 4, no. 1 (2016). Hlm. 35

⁵Andi Asnudin, “Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat,” *Jurnal SmarTek* 7, no. 4 (2009). Hlm. 293

B. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang pembangunan, kita tidak lepas dari pembangunan infrastruktur, yang secara global bisa dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur ialah salah satu ketentuan bagi pembangunan, khususnya pembangunan pertanian dan pedesaan.⁶

Pembangunan infrastruktur ialah bagian penting serta menentukan dalam memperlancar proses pembangunan nasional. Infrastruktur pula memiliki kedudukan penting menjadi salah satu faktor pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan kecepatan serta perkembangan ekonomi wilayah tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur baik itu transportasi, telekomunikasi, sanitasi serta energi. Dengan ini, pembangunan bidang ini merupakan dasar atas pembangunan ekonomi lebih lanjut.⁷

Sesuai dalam Al-Quran pada surah Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya:

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Ayat tersebut menyiratkan bahwa ada tugas bersama guna membayar serta membangun lembaga yang mendukung keberhasilan tersebut. jelas bahwa pembangunan dalam islam juga sebagai perhatian utama dalam kemajuan peradaban. Itulah sebabnya Allah SWT memberikan islam syariah atau

⁶Arif Satria, *Menuju Desa 2030* (Bogor: Crestpent Press, 2011). Hlm. 232.

⁷J Didik Rachbini, “Kebijakan Infrastruktur Kritis Pada Implementasi,” *Artikel*, 2016.

hukum, yang bertujuan membimbing manusia guna mencapai nilai-nilai terbaik di dunia serta di akhirat.⁸

Untuk meningkatkan kesatuan ekonomi, pemerintah diharapkan dapat memberlakukan agenda pemerataan pembangunan secara domestik yang mencakup seluruh wilayah. Sebagaimana kita ketahui, pembangunan nasional sekarang ditopang dari bagian pembangunan wilayah ataupun yang lebih dikenal dengan pembangunan desa, sebab pembangunan perdesaan berdampak besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Masa reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah memberikan peluang yang besar bagi wilayah guna mengembangkan serta memanfaatkan kapasitas daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam telaah kajian ilmiah yang menyangkut aspek pembangunan infrastruktur desa, terkait kebijakan utama oleh Ibnu Kanaha pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi Program Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Tolonuo Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara”. Yang meneliti tentang Implementasi kebijakan pemerintah Desa Tolonulo Selatan Pembangunan infrastruktur di Desa Tolonulo Selatan Kecamatan Tobelo Utara, faktor penghambat serta faktor pendukung mengenai implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Desa Tolonulo Selatan. Lalu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada penelitiannya dimana penelitian ini saat ini terfokuskan pada pelaksanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dalam musyawarah desa. Sedangkan penelitian sebelumnya lebih terfokus pada kebijakan pemerintah Desa Tolonulo Selatan pembangunan infrastruktur di Desa Tolonulo Selatan.⁹

⁸ Rifyal Zuhdi Gultom, “Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 6 (2020). Hlm. 2.

⁹ Ibnu Kanaha, “Implementasi Program Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Tolonuo Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara,” *Jurnal of Publik Administration and Local Governance* 3, no. 2 (2019). Hlm. 1

Pentingnya pembangunan yang mempengaruhi desa dan dsimensi kehidupan masyarakat, mendorong pemerintah guna menyelenggarakan pembangunan di tingkat desa. Merancang sebuah program bukanlah tugas yang ringan, program yang baik harus memenuhi keperluan serta tantangan yang menjadi tujuan dari program tersebut. Semakin banyak serta kompleks tugasnya, semakin kompleks pula perencanaan programnya.¹⁰

Teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, menjelaskan implementasi kebijakan adalah kegiatan yang diambil dari perorangan dan komunitas serta pejabat publik dan swasta guna mencapai arah sasaran yang ditetapkan oleh ketetapan politik. dalam hal sumber daya, dana yang dialokasikan tidak dimulai ketika tujuan kebijakan publik ditetapkan, tetapi selama prosesnya. Implementasi akan menjadi tahap.¹¹

Di Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara merupakan desa yang belum memiliki infrastruktur desa yang memadai yang berkaitan dengan saluran drainase dan infrastruktur jalan. Masih banyaknya genangan air hujan di ruas jalan yang menjadikan jalan rusak serta berlubang sehingga perlunya di bangun drainase, masih ada beberapa titik gorong-gorong yang tidak berfungsi, kondisi badan jalan yang menyempit di ruas Sakal 2 menuju Karyo Mulyo pada titik jembatan memerlukan penanganan untuk dibangun tembok penahan tanah. Dengan hal ini diperkuat dari pernyataan Bapak Abdul Kholik salah satu warga Desa Pekurun mengatakan tidak nyaman dengan kondisi sebagian jalan desa banyak yang rusak disebabkan karena intensitas curah hujan tinggi sehingga penting adanya perbaikan jalan guna menunjang sarana serta prasarana

¹⁰Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Teras Kompleks Ri Gowok, 2009). Hlm. 119.

¹¹Wahyu Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Menggunakan Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn", *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMAP)* 1, no. 4 (2019). Hlm. 70

transportasi serta ekonomi masyarakat. Maka dari itu pemerintah Desa Pekurun membentuk sebuah program gebyar pembangunan desa yang bertujuan agar terpenuhinya infrastruktur desa yang memadai.

Pembangunan infrastruktur desa sudah semestinya mengutamakan pada keterlibatan warga, seperti yang ada di Desa Pekurun, Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara yaitu adanya sebuah program Gebyar Pembangunan Desa di lakukan melalui keterlibatan warga. Keterlibatan warga amatlah penting agar terwujudnya pembangunan di Desa Pekurun, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara.

Adapun program pemberdayaan masyarakat di Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara bahwasanya kebijakan Pemerintah terkait dengan pembangunan desa terangkum dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, yakni akan mengalokasikan anggaran guna pemberdayaan warga dalam aspek pembangunan infrastruktur desa seperti digunakan untuk pembangunan gedung posyandu, sumur bor, lapangan futsal, lapangan volly, lapangan badminton, dan saluran drainase. Alokasi dana ke Desa Pekurun, dusun I sakal, dusun II sakal, dusun III belimbing jaya, dusun IV karyo mulyo dan dusun V mompok, di harapkan dapat mendorong penanganan dari banyak masalah di masyarakat pedesaan tanpa menunggu waktu yang lama untuk program pemerintah kabupaten. Dengan menyalurkan dana ke desa, perencanaan bersama menjadi lebih berkelanjutan, sebab masyarakat dapat segera mengimplementasikan sebagian keperluan dalam dokumen agenda di desanya.¹²

Berdasarkan sejumlah temuan terkait pembangunan Desa Pekurun yakni: tidak efektifnya pelaksanaan program

¹²Rinanti Aditya Puspa, "Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Sumur Gede Kecamatan Godong Kabupaten Gerobogan" (Universitas Negeri Semarang, 2019).

gebyar pembangunan Desa Setelah diadakanya musyawarah Desa pada tahun 2020 untuk pembangunan infrastruktur desa, infrastruktur desa yang belum memadai dan terpenuhi seperti belum adanya gedung posyandu, sumur bor, saluran drainase, lapangan volly, lapangan badminton, dan lapangan futsal. Maka usulan dari musyawarah desa tersebut yaitu membuat sebuah progrm gebyar pembangunan desa yang bertujuan guna memudahkan wrga desa juga terpenuhinya infrastruktur desa yang memadai. Sebab untuk akses jalan desa banyak yang rusak dikarenakan oleh intensitas curah hujan tinggi, banyaknya genangan air hujan di ruas jalan yang menjadikan jalan rusak serta berlubang sehingga perlunya di bangun drainase. Mekanisme dari pelaksanaan program gebyar pembangunan desa sudah terlaksana dengan adanya, lapangan volly, lapangan futsal, lapangan badminton gedung posyandu. Sedangkan untuk fasilitas umum yang di prioritaskan diantaranya pembangunan saluran drainase sendiri belum terlaksana. Pelaksanaan dari Program Gebyar Pembangunan Desa tersebut tidak berjalan sesuai target. Target penyelesaian pembuatan pada tahun awal tahun 2021, justru sampai sudah akhir 2021 belum terlaksana. Bahwasanya melalui gebyar pembangunan desa di Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara penting diteliti karena aspek pembangunan infrastruktur desa sangat berpengaruh untuk kemajuan dari desa tersebut.¹³

Sebagai wujud adanya keterlibatan warga Desa Pekurun dan adanya sebuah program gebyar pembangunan desa saat ini, sudah di bangun beragam infrastruktur berupa, lapangan volly, lapangan futsal, dan lapangan badminton dan gedung posyandu.¹⁴ Dari berbagai infrastruktur tersebut yang terjadi di lapangan adanya kendala dalam pembuatan sumur bor, dan saluran drainase belum terselesaikan.

¹³ Hasil wawancara oleh Bapak Taryono pada 15 Juli 2021

¹⁴ Hasil wawancara oleh Bapak Madian pada 20 Juli 2021

Tabel I.A
Daftar Infrastruktur Desa Pekurun

No	Kegiatan Pembangunan	Tahun	Keterangan
1	Gedung Posyandu	2020-2021	Berjalan Baik
2	Saluran Drainase	2020	Terhambat
3	Sumur Bor	2020	Berjalan
4	Lapangan Volly	2020-2021	Berjalan Baik
5	Lapangan Futsal	2020-2021	Berjalan Baik
6	Lapangan Badminton	2020-2021	Berjalan Baik

Dalam Tabel I.A diatas merupakan daftar Infrastrutur Pembangunan Desa di Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung.¹⁵

Di karenakan belum adanya infrastruktur desa yang memadai, Pemerintah desa melakukan musyawarah desa yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur desa melalui program gebyar pembangunan desa. Pembangunan ini di lakukan pada awal 2020 dan target penyelesaian pembangunan pada awal tahun 2021 sesuai dengan habisnya jabatan kepala desa, namun yang terjadi di lapangan hingga akhir tahun 2021 pembangunan infrastruktur desa belum terselesaikan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tidak berjalan dengan efektif sehingga masyarakat belum bisa merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur desa tersebut.¹⁶

Implementasi pembangunan bisa di katakan maksimal atau efektif apabila terlaksana dengan tepat waktu sesuai dengan yang sudah di targetkan. Pembangunan infrastruktur desa berdasarkan program gebyar pembangunan desa yang di laksanakan sejak tahun 2020 dan di targetkan selesai pada

¹⁵ Hasil wawancara oleh Bapak Taryono pada 25 Juli 2021

¹⁶Endang Soetari, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).

awal tahun 2021, namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang telah di targetkan. Di karenakan ada keterlambatan pada pembangunan saluran drainase sehingga program gebyar pembangunan desa ini tidak maksimal. Padahal saluran drainase merupakan infrastruktur sangat penting di Desa Pekurun guna menunjang sarana serta prasarana transportasi serta ekonomi masyarakat.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Setelah mengamati dan melihat penjelasan yang sudah disampaikan pada latar belakang masalah sebelumnya, peneliti memfokuskan penelitian pada Implementasi program gebyar pembangunan desa.

Adapun yang menjadi sub-fokus penelitian ialah:

1. Belum adanya infrastruktur yang memadai di Desa Pekurun
2. Terkendalanya program pembangunan Desa
3. Terkait penyelenggaraan pembangunan desa tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dalam musyawarah desa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah yang sudah di sampaikan diatas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ialah:

1. Bagaimana Tingkat Keberhasilan Implementasi Program Gebyar Pembangunan Desa dalam Infrastruktur Desa di Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara?
2. Adakah Faktor Penghambat Implementasi Program Gebyar Pembangunan Desa di Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung utara?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini guna mengetahui:

1. Tingkat Keberhasilan Implementasi Program Gebyar Pembangunan dalam Infrastruktur Desa di Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara
2. Faktor Penghambat Implementasi Program Gebyar Pembangunan Desa dalam Infrastruktur Desa di Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung utara

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah:

a. Secara Teoritis

1. Memberikan pemahaman serta wawasan untuk akademisi terkait implementasi program gebyar pembangunan Desa terhadap infrastruktur desa.
2. Sebagai kontribusi karya ilmiah selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama di masa mendatang agar memudahkan peneliti yang lain.

b. Secara Praktis

1. Untuk Aparatur Pemerintah terutama Pemerintah Desa Pekurun dapat dijadikan rujukan dalam rancangan pembangunan desa.
2. Untuk masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi warga desa guna menilai instansi pemerintah dalam kehidupan masyarakat.
3. Untuk peneliti diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta pemahaman penelitian khususnya yang berkaitan dengan organisasi pemerintah implementasi program pembangunan Desa Pekurun.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

1. “Jurnal yang berjudul Pengaruh Infrastruktur pada Pembangunan Ekonomi Wilayah Indonesia” oleh Rindang Bangun Prasetyo dan Muhammad Firdaus tahun 2009. Bersumber pada hasil yang di dapatkan dari persamaan regresi data panel dampak tenaga kerja serta infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi pertama, aktivitas ekonomi di Indonesia masih bersifat padat karya, sehingga kebijakan yang menaikkan kesempatan kerja bagi penyerapan tenaga kerja akan menaikkan pertumbuhan ekonomi secara lebih efektif. Kedua, infrastruktur seperti listrik, jalan, ataupun air besir, berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Listrik memegang peranan penting dalam sistem produksi. Dengan ini, kebijakan pembangunan infrastruktur sangat relevan guna menaikkan perekonomian Indonesia sebelum krisis global dan membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Perbedaannya terletak pada aspek konstruksi.¹⁷ Perbedaannya dengan skripsi ini adalah teletak pada aspek pembangunannya. Penelitian terdahulu yaitu pembangunan ekonomi desa, sedangkan penelitian ini pembangunan infrastruktur desa.

2. “Jurnal yang berjudul Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” oleh Novi Maryaningsih, Oki Hermansyah serta Minawati Safitri Tahun 2014. Hasil perbedaan perolehan perkapita jelas antara Jawa serta luar Jawa di Indonesia.¹⁸ Perbedaannya dengan skripsi ini yaitu penelitian terdahulu meneliti pertumbuhan ekonomi

¹⁷Muhammad Firdaus, “Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 2, no. 2 (2009). Hlm. 222-236

¹⁸Novi Maryaningsih, “Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 17, no. 1 (2014). Hlm. 78

Indonesia, sedangkan pada skripsi ini meneliti tentang pembangunan infrastruktur desa.

3. “Skripsi dengan judul Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang” oleh Wilda Sari Tahun 2020. Hasil penelitian yaitu bahwasanya dalam menyusun rencana jangka menengah pembangunan desa, pemerintah desa senantiasa mengikut sertakan bagian warga desa serta aparat kepolisian serta TNI, serta seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat setempat, dan menyampaikan arahan serta saran. Kepada pemerintah desa serta atas perancangan pembangunan desa menurut pimpinan perangkat desa menurut pimpinan perangkat desa dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan tata tertib yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada pedoman RPM.¹⁹ Perbedaannya dengan skripsi ini yaitu, peneliti terdahulu meneliti peran kepala desa dalam membangun infrastruktur jalan, sedangkan penelitian ini yaitu meneliti pelaksanaan sebuah program pembangunan desa.
4. “Skripsi dengan judul Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis” oleh Wirda Afni Tahun 2013. Hasil penelitian yaitu Analisis pembangunan pedesaan di Desa Teluk Lecah, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, hasilnya kurang baik. Hal ini dikarenakan terdapat kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa dalam pembangunan

¹⁹Wilda Sari, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang” (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020). Hlm. 6

desa.²⁰ Perbedaanya dengan skripsi ini yaitu terletak pada metode penelitian, jika penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

5. “Skripsi dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara” oleh Yuni Kurniati tahun 2019. Hasil penelitian yaitu justru tingkat partisipasi warga di Desa Mulyorejo 1 bisa dilihat pada bagian perancangan, penyelenggaraan dan pemantauan yang dinilai baik pada partisipasi warga pada bagian perancangan pelaksanaan pembangunan dan pendayagunaan serta pelestarian.²¹ Perbedaanya dengan skripsi ini yaitu, penelitian terdahulu meneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam membangun desa, sedangkan penelitian ini meneliti program pembangunan desa untuk infrastruktur desa.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif ialah penelitian yang berfungsi guna memahami serta menggunakan secara komprehensif dengan cara yang berbeda fenomena-fenomea subjek penelitian, baik itu persepsi, prilaku, tindakan, motivasi, serta melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa dalam kondisi alam tertentu.²²

²⁰Wilda Afni, “Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013). Hlm. 2.

²¹Yuni Kurniyati, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara” (UIN Raden Intan Lampung, 2019). Hlm. 3

²²Angki Aulia Muhammad, *Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat* (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013). Hlm. 66

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research), ialah metode yang meneliti fenomena dalam lingkungan alam.

Menurut Suharsimi Arikunto, jenis penelitian mengacu pada aspek-aspek yang berkaitan dengan tujuan, bidang ilmu, pendekatan dan lokasi penelitian.

1. Penelitian dalam arti tujuan, ialah penelitian deskriptif, ialah penelitian yang sebenarnya sekedar menggambarkan kejadian di suatu wilayah, bidang, atau wilayah tertentu. Informasi yang dikumpulkan dikelompokkan atau dikategorikan menurut jenis, kualitas atau sifatnya.
2. Dilihat dari aspek pendekatan, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif artinya menggunakan data kualitatif, jadi ada tiga bagian pendekatan yang berkaitan dengan pendekatan tersebut, ialah: pendekatan rasional yang menggali makna masalah tidak hanya berdasarkan kepekaan empiris, tetapi juga logika. Pendekatan fenomenologi, ialah penafsiran sebagai subjek ketika menafsirkan benda-benda di sekitarnya, pendekatan filosofis adalah melihat masalah dari sudut pandang filosofis dan mencoba menjawab serta memecahkan masalah ini dengan metode analitis. Dalam hal ini, peneliti melaksanakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologis, ialah interpretasi atas pengalaman manusia

sebagai subjek interpretasi objek-objek sekitarnya.

3. Dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, setiap bidang ilmu memerlukan perluasan menggunakan kegiatan penelitian. Setiap bidang ilmu membutuhkan perluasan dengan kegiatan penelitian, baik jenis maupun bidang yang berbeda. Dalam riset ini berjudul Implementasi Program Gebyar Pembangunan Desa Terhadap Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara)

b. Sifat penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif ialah jenis penelitian yang bertujuan guna menyampaikan gambaran lengkap terkait setting social maupun di tujukan guna penelitian serta penjelasan terkait sebuah fenomena maupun kenyataan sosial, melalui cara menjelaskan beberapa variabel yang berhubungan dengan masalah serta objek yang diteliti, maupun sebagai prosedur untuk mendeskripsikan kondisi suatu subjek ataupun subjek penelitian saat ini berdasarkan bukti yang sudah ada.²³

Dalam hal ini penulis menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pelaksanaan program gebyar pembangunan Desa di Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendidikan Praktik* (Jakarta: Gama Press, 1999). Hlm. 136

c. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, karena masalah manusia terutama bergantung pada observasi.

Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif merupakan metode yang didasarkan pada filosofi postpositivisme, sedangkan untuk studi objek alam, yaitu peneliti sebagai alat utamanya, adalah teknik pengumpulan data melalui triangulasi (agregasi). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, serta temuan penelitian lebih mengutamakan relevansi daripada generalisasi.²⁴

2. Sumber Data

Pada penelitian kualitatif lebih dekat dengan kualitas maupun kekuatan public dan masukan yang jelas. Jadi, ada perbedaan yang sangat jelas untuk dibuat dalam menambahkan kualifikasi, yang berfokus pada ketersediaan fakta dan data. Oleh karena itu, peneliti harus dengan cermat serta teliti untuk memastikan bahwa sumber yang disampaikan merupakan hasil informasi yang valid. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua sumber, ialah data primer serta data skunder.

a. Data Primer

Umi Nurimawai mengatakan, data primer yaitu data yang bersumber dari sumber asli atau pertama. Informasi ini tidak termasuk dalam peta yang dikompilasi dan file peta. Informasi ini harus di cari melalui sumber atau dalam bentuk teknis responden, ialah manusia yang di jadikan objek penelitian atau

²⁴Angki Aulia Muhammad, "Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat" (Universitas Pendidikan Indonesia, 2013).Hal. 66

manusia yang di gunakan untuk sarana memperoleh informasi ataupun data.²⁵

Data primer dari penelitian ini merupakan data yang berkenaan dengan implementasi program gebyar pembangunan desa dalam infrastruktur desa pada Desa Pekurun. Data primer yang peneliti maksud adalah untuk melihat bagaimana implementasi program gebyar pembangunan desa dalam infrastruktur desa, dan faktor penghambat implementasi program gebyar pembangunan desa dalam infrastruktur desa. Dalam penelitian ini menggunakan *teknik purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu.²⁶ Kriteria yang harus dipertimbangkan yaitu:

1. Subyek yang lama serta intens terlibat dengan sebuah aktivitas maupun tempat kegiatan, objek atau fokus penelitian dan biasanya dicirikan oleh ketidakmampuan untuk memberikan informasi tentang objek yang bersangkutan.
2. Subyek masih terlibat secara utuh dan aktif dalam wilayah serta aktivitas sebagai fokus kajiannya.
3. Subyek memiliki banyak waktu luang untuk diwawancarai
4. Orang yang menyampaikan informasi biasanya tidak diproses terlebih dahulu, mereka juga masih relatif

²⁵Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2 (2017). Hlm. 211

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RAD* (Bandung: Alfabeta, CV, 2017). Hal. 124

jujur dalam menyampaikan informasi.

Berdasarkan kriteria diatas, yang menjadi sumber informan dalam data primer dapat dilihat pada tabel I.B sebagai berikut:

Tabel I.B
Data Primer

No	INFORMAN	JABATAN	ALASAN
1.	Madian,H.M.,SE	Kepala Desa	Karena sebagai key informan yang akan dijadikan fokus penelitian terhadap skripsi ini mencari tau implementasi yang dilakukan oleh kepala desa dalam membangun infrastruktur desa.
2.	Taryono	Sekretaris Desa	Karena sekdes cukup andil dalam pelaksanaan kerja kades dan untuk melaksanakan kegiatan harus melalui sekdes terlebih dahulu.
3.	Ayu Wulandari	Kasi Keuangan	Karena bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
4.	Monica Eriana, S.Kom	Kasi Pembangunan	Karena mempunyai tugas melaksanakan dan membina pembangunan serta mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5.	M. Ilyas	Warga Desa Pekurun	Karena ingin mengetahui apakah pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa berjalan sesuai target dan apakah ada faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa ini.

Dalam penelian ini yang akan menjadi sumber data primer untuk dijadikan sampel adalah para pemerintah Desa Pekurun dan warga Desa Pekurun yaitu Bapak Madian, H.M., SE, Bapak Taryono, Ibu Ayu Wulandari, Ibu Monica Erinia, S.Kom, dan Bapak M. Ilyas.

b. Data Sekunder

Sugiyono mengatakan, data sekunder ialah sumber yang secara tidak langsung meninformasikan pengumpulan data. Artinya sumber data penelitian di dapatkan dari media maupun tidak langsung seperti buku catatan, bukti atau arsip yang ada, tercetak dan umumnya tidak dipublikasikan. Dengan kata lain, peneliti harus mencari informasi dengan berkunjung ke perpustakaan pusat studi, pusat arsip, maupun membaca banyak buku yang berkaitan dengan penelitiannya.²⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, metode pengumpulan data yaitu cara strategis dalam penelitian sebab tujuan utama penelitian adalah guna memperoleh informasi. Sugiyono juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data berlangsung di lingkungan alam, sumber data primer serta metode pengumpulan data terutama berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi. Guna mendapatkan informasi yang akurat dan objektif, penulis memakai beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu metode penting dalam melaksanakan penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif. Secara umum, pewawancara harus berupaya untuk mempunyai hubungan yang baik dengan objek penelitian (responden). Dukungan responden tergantung pada bagaimana peneliti menjalankan tugasnya, sebab tujuan wawancara yaitu guna mendapatkan informasi yang dianggap data, serta informasi

²⁷Sugiyono. Hlm. 35

ini dibutuhkan guna mengembangkan formula yang lebih sesuai dengan tujuan penelitian yang diperoleh.²⁸ Melalui metode ini peneliti melakukan dialog interaktif kepada narasumber yakni Kepala Urusan kantor Balai Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara.

b. Observasi

Observasi yaitu sebuah proses sistematis merekam pola perilaku, objek, serta kejadian manusia tanpa bertanya maupun berinteraksi dengan subjek. Proses ini mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi mengacu pada kegiatan memperhatikan, mencatat fenomena yang terjadi, serta memeriksa kaitannya antara aspek-aspek dari suatu fenomena. Artinya observasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan.²⁹ Artinya observasi ini dilakukan untuk mengamati bagaimana Implementasi Program Gebyar Pembangunan Desa terhadap Infrastruktur Desa di Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya kenangan seseorang. Pengumpulan data ini dilakukan melalui dokumentasi oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai hasil yang dipublikasikan tentang sumber-sumber yang

²⁸Newman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: Indeks, 2013). Hlm. 493

²⁹<http://psikologi.fisip-unmul.ac.id> diakses pada 5 November 2021 pukul 21.25 WIB

diteliti.³⁰ Dokumentasi ialah metode pengumpulan data yang tidak langsung diarahkan pada subjek penelitian. Dokumen yang di review bisa bermacam-macam jenisnya, termasuk, surat pribadi, buku, notulen, rapat, laporan, catatan kasus, pekerjaan sosial, serta dokumen lainnya.³¹ Metode ini menjadi bukti kuat bahwa penelitian yang dilaksanakan adalah jelas dan nyata tanpa adanya manipulasi informasi. Jadi dokumentasi diambil saat mereka telah melakukan penelitian dengan narasumber dan lokasi mereka. Ini juga berisi dokumen yang mengkonfirmasi keabsahan penelitian ini. Dokumen ini yaitu foto, catatan penelitian, laporan kegiatan, dan lain-lain.

Tabel I.C

No.	Nama Agenda	Jenis Dokumentasi	Ada	Tidak Ada
1.	Jumlah Penduduk	Arsip	✓	
2.	SDM	Arsip	✓	
3.	Struktur Desa	Arsip	✓	
4.	Monografi Desa	Arsip	✓	
5.	Tipografi Desa	Arsip	✓	
6.	Orbitasi	Arsip	✓	
7	Mata Pencarian	Arsip	✓	

4. Analisis dan Penyajian Data

Penyajian serta analisis data adalah uraian dari hasil penelitian dengan mengacu pada fokus penelitian serta kerangka teoritik dan data yang ada di dalam

³⁰Suci Arischa, "Analisis Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Administrasi* 6, no. 1 (2019). Hlm. 8

³¹Kondjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1976).

objek penelitian. Penyajian serta analisis data berisi mengenai uraian data serta temuan yang di dapatkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi sebagai alat guna mendapatkan data yang berhubungan dengan mendukung dalam penelitian ini.³² Menurut Sugiyono, analisis ialah proses menggali serta menata secara terstruktur data yang di dapatkan melalui wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data pada setiap bagian, menjelaskan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting serta akan dipelajari, serta menyusun kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³³

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah sebuah proses pemilihan, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, ringkasan serta perubahan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berjalan secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung, terlebih sebelum data benar-benar terkumpul seperti terlihat dalam kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, serta pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.³⁴ Menurut Sugiyono, reduksi data dalam analisis data penting dilaksanakan guna mengingat data yang telah di dapatkan dilapangan jumlahnya cukup banyak, oleh

³²<http://digilib.iain-jember.ac.id> diakses pada 6 November 2021 pukul 06.21 WIB

³³<http://eprints.peradaban.ac.id> diakses pada 6 November 2021 pukul 06.20 WIB

³⁴Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018). Hlm. 17

karenanya perlu dicatat secara teliti, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, serta rumit. Sehingga penting untuk dilakukan reduksi data.³⁵ Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan data hasil wawancara serta dokumentasi yang di dapatkan dari setiap responden. Langkah reduksi data ada beberapa tahapan diantaranya:

1. Menyusun informasi yang didapatkan dan menggolongkan hasil wawancara sesuai dengan tahap penelitian, ialah kelompok peran politik dan ringkasan informasi yang diterima selama wawancara.
2. Peneliti membuat catatan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan proses, untuk membantu peneliti mendapatkan kelompok dan pola dalam data. Metode reduksi data dapat dipilih dengan ringkasan atau deskripsi singkat. Kelompokkan dalam format yang lebih luas serta banyak lagi.
3. Setelah melaksanakan wawancara dengan para informan, peneliti melanjutkan menulis catatan-catatan kecil (ringkasan) ini untuk melengkapi wawancara. Selain itu, berdasarkan kesimpulan yang dikembangkan, peneliti memutuskan bagian mana dari data yang harus dibuat dari template untuk merangkum beberapa data yang masih tersebar.

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R Dan D*, n.d.

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman mengatakan, penyajian data ialah kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan penarikan kesimpulan serta tindakan yang akan diambil. Mereka percaya bahwa penyajian data yang lebih baik adalah alat utama analisis kualitatif dengan berbagai matriks, grafik, kisi dan diagram. Mereka dirancang untuk mengkonsolidasikan informasi terorganisasi dalam bentuk yang nyaman serta mudah diakses. Hal ini memungkinkan analisis guna mengetahui kejadian saat ini serta memutuskan apakah akan menarik kesimpulan yang valid ataupun melanjutkan analisis yang dianggap berguna dalam penyajian data.

c. Teknik Uji Validasi Data

Supaya dapat dipertanggungjawabkan, data yang diterima harus diverifikasi terlebih dahulu. Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data (validasi data) dalam penelitian ini yaitu triangulasi metode. Teknik triangulasi menurut Sugiyono, teknik triangulasi adalah metode pengumpulan data serta sumber yang ada. Ketika sebuah penelitian mengumpulkan data dengan triangulasi, peneliti sebenarnya mengumpulkan data sekaligus juga menguji reliabilitas data, ialah menguji reliabilitas data dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda serta sumber data yang berbeda.³⁶

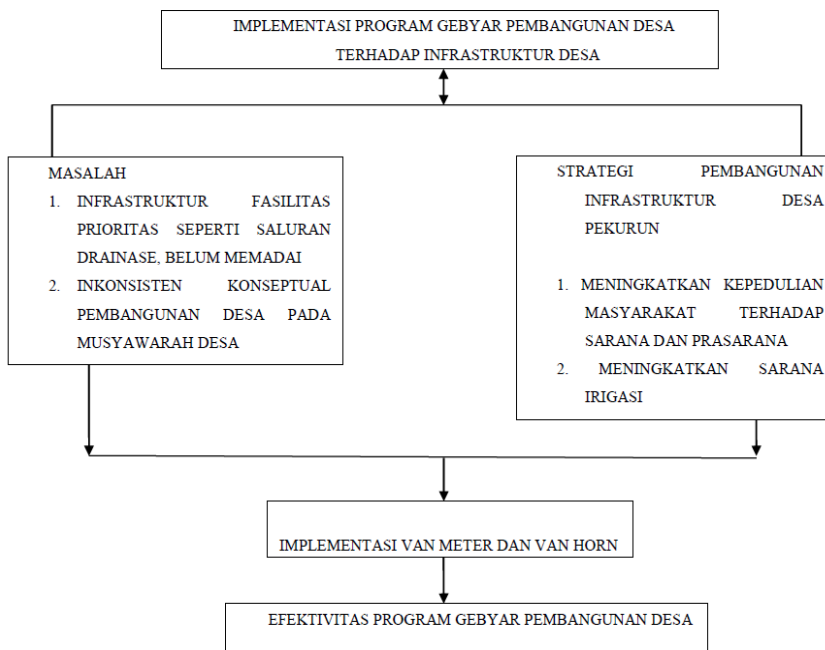
³⁶<http://eprints.uny.ac.id> diakses pada 6 Desember 2021 pukul 20.50 WIB

d. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman hanyalah sebuah aktivitas dilingkungan umum kesimpulan juga direvisi selama penelitian. Tinjauan dapat sesingkat pemikiran yang mengalir di benak analisis (peneliti) saat menulis, meninjau catatan lapangan, atau sedalam dan melelahkan karena melibatkan peer review dan brainstorming untuk mengembangkan tema intersubjektif. Kesepakatan atau menyeluruh, mencoba untuk menempatkan salinan temuan di kumpulan data lain.³⁷

I. Kerangka Teoritik

Gambar 1.1
Kerangka Teoritik



³⁷Miles, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992). Hlm. 17-18

Implementasi program gebyar pembangunan desa terhadap infrastruktur desa ditujukan untuk mengetahui mengenai efektifitas penerapan strategi pembangunan di Desa Pekurun yang meliputi, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sarana dan prasarana, meningkatkan sarana irigasi, pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan. Namun di lapangan di temukan masalah berupa infrastruktur fasilitas prioritas seperti saluran drainase belum memadai, adanya inkonsisten konseptual pembangunan desa pada musyawarah desa dimana hal ini membuktikan adanya gap antara teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn mengenai pembangunan dan yang terjadi di lapangan sehingga mempengaruhi efektifitas program gebyar pembangunan desa.



BAB II

IMPLEMENTASI, PEMBANGUNAN DESA, PEMERINTAH DESA, INFRASTRUKTUR DESA

A. IMPLEMENTASI

1. Pengertian Implementasi

Implementasi ialah sebuah kegiatan ataupun penyelenggaraan dari suatu rancangan yang telah tersusun secara cermat dan terperinci. Implementasi ini umumnya dikatakan tuntas setelah perencanaan. Implementasi pula dapat bermakna penyelenggaraan yang berasal dari bahasa inggris *Implement* yang artinya menyelenggarakan. Implementasi umumnya di laksanakan sesudah persiapan dikatkan matang.³⁸

Menurut Nurudin Usman, Implementasi ialah sebuah kegiatan, gerakan, langkah ataupun adanya proses suatu skema. Implementasi tidak hanya sebatas aktivitas, melainkan tindakan yang direncanakan guna mencapai tujuan kegiatan.³⁹

Implementasi, menurut Van Meter dan Varn Horn, ialah kegiatan yang diselenggarakan oleh orang dan masyarakat, serta pejabat pemerintah serta swasta, guna mencapai tujuan yang ditentukan oleh keputusan politik, proses legitimasi, serta alokasi sumber daya untuk disepakati. Dimulai bukan dari penetapan tujuan dan sasaran kebijakan negara, melainkan dari tahap pelaksanaanya.⁴⁰

Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah kegiatan yang direncanakan dan bukan sekedar kegiatan yang dilaksanakan secara ketat berdasarkan standar tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Maka dari itu, implementasinya tidak hanya, tetapi juga mempengaruhi objek berikut, ialah

³⁸E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). Hlm. 56

³⁹Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Hlm. 70

⁴⁰Wahyu Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Menggunakan Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn", *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMAP)* 1, no. 4 (2019). Hlm. 70

kurikulum. Implementasi kurikulum adalah proses penerapan ide, program, maupun kegiatan baru dengan tujuan orang lain dapat mengadopsi serta mengubah apa yang mereka pelajari dan mencapai hasil apa yang diinginkan.

2. Indikator Implementasi

Implementasi, menurut Van Meter dan Varn Horn, ialah kegiatan yang diselenggarakan oleh orang serta kelompok, serta pejabat pemerintah serta swasta, guna mencapai tujuan yang ditentukan oleh keputusan politik, proses legitimasi, serta alokasi sumber daya untuk disepakati. Dimulai bukan dari penetapan tujuan dan sasaran kebijakan negara, melainkan dari tahap pelaksanaannya.⁴¹

1. Standar

Standar atau standarisasi diawali dengan kata standar yang berarti satuan ukuran untuk membandingkan mutu, biaya, dan kinerja atau produk. Dengan demikian, konsep standarisasi adalah proses penetapan standar teknis, standar spesifikasi, metode pengujian standar, definisi standar, prosedur standar (atau praktik), dan lain-lain. standarisasi adalah standar atau pedoman yang menjadi acuan minimal untuk mencapai harmonisasi.

Standar biasanya digunakan sebagai ukuran suatu objek yang mendefinisikan karakteristik dan fitur tertentu yang ditetapkan untuk objek tersebut. standarisasi disebut sebagai upaya bersama dalam pembentukan standar. Dengan standar ini, benda tersebut memiliki nilai tambah dan diakui oleh seluruh masyarakat.⁴²

Menurut Sulastri, standar ialah persetujuan-persetujuan yang sudah terdokumentasi yang di dalamnya terdapat diantaranya perincian-perincian teknis

⁴¹Wahyu Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Menggunakan Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn", *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMAP)* 1, no. 4 (2019). Hlm. 70

⁴²A. Adang Supriyadi, *Airmanship*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utara, 2019), hal. 183

atau standar-standar yang akurat yang dimanfaatkan untuk kebijakan, informasi, serta penjelasan-penjelasan khusus guna menjamin sebuah barang, produk, proses, ataupun pelayanan sesuai dengan yang telah dinyatakan.⁴³

Menurut peraturan pemerintah RI Nomor 102 tahun 2000 tentang standarisasi nasional, standar ialah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara serta metode yang disusun sesuai dengan konsensus seluruh pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, dan pengalaman, perkembangan masa kini serta masa yang akan datang guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.⁴⁴

2. Sumber Daya

Manusia adalah komponen utama dari lembaga yang mendorong serta melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran. Kesuksesan lembaga ditentukan oleh kualitas individunya. SDM akan bekerja dengan baik ketika lembaga bisa menjunjung pengembangan karir mereka dengan benar-benar menunjang kompetensi mereka. Sumber daya manusia bisa diartikan menjadi seluruh orang yang berpartisipasi dalam sebuah lembaga untuk mencapai tujuannya.⁴⁵

Nawawi memberi konsep SDM menjadi dua bagian, ialah penjelasan secara makro serta secara mikro. SDM secara makro ialah seluruh individu selaku populasi serta masyarakat sebuah wilayah ataupun dalam pemisah kawasan tertentu yang telah mencukupi umur angkatan kerja, baik yang sudah maupun yang belum mendapat pekerjaan (lapangan kerja). SDM secara mikro, yaitu

⁴³<http://eprints.polsri.ac.id> Diakses Pada 20 Juni 2022 Pukul 13.42

⁴⁴<http://www.duniapengertian.com> Diakses Pada 20 Juni 2022 Pukul 15.33

individu maupun masyarakat yang bekerja sebagai bagian sebuah lembaga yang dikatakan pegawai, personil, pekerja, karyawan, tenaga kerja dan lain-lain.⁴⁶

Veithzal Rivai menyebutkan bahwa SDM ialah individu yang bersedia, siap serta bisa memberi sumbangan upaya pencapaian sasaran suatu lembaga. Di sisi lain sumber daya manusia adalah salah satu bagian masukan (input) dengan unsur lainnya semacam dana, materi, serta struktur/teknologi diganti sebagai sistem manajemen sebagai keluaran (output) berbentuk barang maupun jasa dalam upaya tercapainya tujuan perusahaan.⁴⁷

3. Komunikasi

Komunikasi dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari kata Latin *communicatio*, serta berpangkal pada kata *communis* yang berarti sama. Maksud sama disini yaitu sama makna. Hal yang telah disampaikan oleh Hafied Cangara, komunikasi bersumber pada kata Latin *communis* yang berarti membangun kebersamaan dengan dua orang maupun lebih.⁴⁸

Komunikasi ialah kegiatan dasar manusia. Dengan komunikasi, manusia dapat berinteraksi antara satu dengan yang lainnya baik pada kehidupan sehari-hari di rumah, di tempat kerja, dipasar, di masyarakat, serta dimanapun orang tidak berada. Tidak ada orang yang tidak berperan serta dalam komunikasi. Komunikasi amat utama untuk kehidupan manusia. Pertumbuhan pemahaman manusia dari hari ke hari sebab adanya komunikasi. Komunikasi juga ialah suatu struktur sosial

⁴⁶ Hadari Nawawi, *Perencanaan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hal. 37

⁴⁷ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perubahan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 6

⁴⁸ Danil Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Cet. II (Jakarta: PT Indeks, 2008) hal. 25-26.

yang saling memerlukan, sehingga komunikasi dan masyarakat tidak dapat dipisahkan.⁴⁹

Menurut Carl I Hovland, ilmu komunikasi ialah usaha terstruktur guna memperkuat prinsip-prinsip transfer informasi dan pendirian argumen serta perilaku. Kesesuaian bahasa yang digunakan pada sebuah percakapan tidak serta merta mengarah pada makna yang sama. Dengan kata lain, sekedar memahami bahasa tidak berarti memiliki makna. Jelas bahwa percakapan antara dua orang dapat disebut komunikasi.⁵⁰

Selain itu, menurut Edward Depari, komunikasi merupakan metode penyampaian ide, keinginan, dan pesan melali simbol-simbol tertentu yang membawa makna dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Tujuan pesan disini adalah untuk menyampaikan amanat melalui komunikasi langsung atau tatap muka dengan penerima pesan.⁵¹

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana

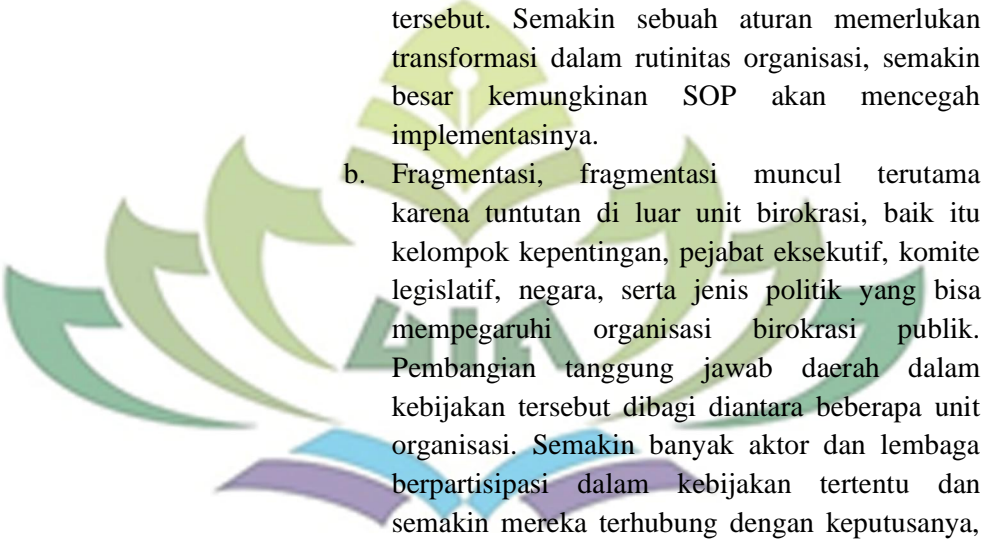
Penekanan ditempatkan pada lembaga penyelenggara seperti lembaga resmi serta lembaga tidak resmi yang ikut serta dalam implementasi kebijakan. Hal ini penting sebab kemampuan penegakan prosedur amat dipengaruhi oleh karakteristik yang sangat relevan bersama agen penegak. Hal ini mengacu pada kondisi politik dimana sejumlah prosedur dibutuhkan oleh pelaksana yang demokratis serta kredibel. Selain itu, lingkup ataupun area sebagai isu pokok dalam menetapkan implementasi kebijakan lembaga.

Ada dua karakteristik organisasi eksekutif, dalam hal ini karakteristik pertama oleh susunan birokrasi yaitu Standar Operating Procedures (SOP) serta fragmentasi.

⁴⁹ Roudhonah, *Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: UIN Press, 2007) hal. 27

⁵⁰ Onong Uchjana Efendy, M.A, *Ilmu Komunikasi dan Praktek* (Bandung: Remadja Karya, 1998), hal. 11-12.

⁵¹ H.A.W. Widjaja, *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hal. 13-14.

- 
- a. Standar Operating Procedures (SOP) di kembangkan menjadi respon internal terhadap keterbatasan masa serta sumber daya penyelenggara serta kemauan akan kesamaan dalam praktik lembaga yang kompleks dan tersebar luas. SOP ini secara teratur didesain guna mencegah keadaan masa lampau yang khas mengubah sebuah aturan karena tak sama dengan keadaan ataupun program baru. SOP dapat mencegah penerapan sebuah aturan baru yang memerlukan metode kerja baru maupun jenis personil baru guna menerapkan sebuah aturan tersebut. Semakin sebuah aturan memerlukan transformasi dalam rutinitas organisasi, semakin besar kemungkinan SOP akan mencegah implementasinya.
 - b. Fragmentasi, fragmentasi muncul terutama karena tuntutan di luar unit birokrasi, baik itu kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, komite legislatif, negara, serta jenis politik yang bisa mempegaruhi organisasi birokrasi publik. Pembagian tanggung jawab daerah dalam kebijakan tersebut dibagi diantara beberapa unit organisasi. Semakin banyak aktor dan lembaga berpartisipasi dalam kebijakan tertentu dan semakin mereka terhubung dengan keputusannya, semakin kecil kemungkinannya untuk berhasil dalam implementasinya. Edward juga menjelaskan bahwa secara global, semakin banyak koordinasi yang diperlukan guna melaksanakan sebuah kebijakan, semakin kecil kemungkinan untuk berhasil.⁵²

⁵²A. Rahmawati, *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten di Kabupaten Bone*, (Makassar: UM Makassar, 2020), hal. 20

B. Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Program gebyar pembangunan desa merupakan program pembangunan secara besar-besaran untuk membangun infrastruktur desa. Program pembangunan itu sendiri merupakan program prioritas yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan dan permasalahan strategis yang muncul, untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan untuk lebih memanfaatkan potensi desa dalam satu periode.⁵³

Pembangunan perdesaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan bagi kemaslahatan masyarakat pedesaan.⁵⁴ Menurut Deddy T. Tikson, pembangunan didefinisikan sebagai perubahan ekonomi, sosial serta budaya secara sadar melalui kebijakan serta strategi ke arah yang di inginkan. Maka dari itu, proses pembangunan berlangsung dalam segala aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, serta berlangsung pada tingkat makro (nasional) serta mikro (masyarakat/kelompok).

Pembangunan ialah segala proses transformasi yang dilaksanakan melalui usaha-usaha secara sadar serta terencana. Sedangkan perkembangan ialah proses transformasi yang berlangsung secara alami sebagai efek adanya pembangunan. Maka dari itu, bisa disebutkan bahwa pada prinsipnya pembangunan tidak terlepas dari pertumbuhan, maksudnya bahwa pembangunan dapat mengakibatkan terjadinya pertumbuhan serta pertumbuhan akan terjadi sebagai dampak adanya pembangunan. Dengan ini, pertumbuhan dapat berupa pengembangan maupun

⁵³Hasil Wawancara Kepala Desa Pekurun Bapak Madian, Pada 14 Maret 2022

⁵⁴Permendes Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, “Pasal 1 Ayat 9.”

penaikkan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah masyarakat.⁵⁵

Menurut Ali Hanapiah Muhi, pembangunan desa ialah seluruh kegiatan masyarakat (manusia dan pemerintah) di desa dalam mengembangkan diri, keluarga, masyarakat di lingkungan desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan serta keamanan, agama serta pemerintah yang di lakukan secara terstruktur serta menimbulkan dampak positif untuk kemajuan desa.⁵⁶

Pembangunan pedesaan harus fokus pada tantangan, potensi, aspirasi masyarakat dan menetapkan prioritas pembangunan pedesaan. Secara umum tujuannya adalah untuk mencapai pembangunan ekonomi pedesaan berbasis sumber daya pertanian dengan kegiatan non-pertanian dengan melihat kelestarian wilayah serta keperluan masyarakat kecil. Tujuan umum ini dapat dibagi menjadi tujuan khusus berikut:

- a. Adanya infrastruktur fisik serta sosial yang memperluas jalan, fasilitas pendidikan serta kesehatan di semua lingkungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan pembangunan ekonomi, yang meliputi adanya sumber pendapatan, kapasitas pertanian yang tinggi, serta tingkat efisiensi yang tinggi dalam penggunaan sumber daya alam.
- c. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, yang mencakup kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup, mengembangkan perlindungan lingkungan bagi segala pihak, serta berupaya menghilangkan kerusakan serta pencemaran lingkungan.⁵⁷
- d. Konsep perancangan pembangunan dari bawah (Bottom Up Planning).

⁵⁵<http://bappeda.bulelengkab.go.id> Diakses Pada 19 Juni 2022 Pukul 22.23 WIB

⁵⁶Desmiwar, *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan*.Hlm. 44

⁵⁷Rahardjo Adisasmita, *Op.Cit.*, h. 23-24

Diketahui bahwa pembangunan pedesaan sudah banyak dilaksanakan, namun hasilnya dinilai kurang memuaskan. Dengan merangkul partisipasi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, pembangunan pedesaan harus dilihat tidak hanya menjadi tujuan, tetapi menjadi tantangan pembangunan:

1. sebagai usaha percepatan pembangunan pedesaan dengan menyediakan prasarana dan sarana pembangunan guna memperkuat masyarakat.
2. Sebagai usaha yang efektif dan berkelanjutan guna memperlancar dan memperkuat pembangunan ekonomi daerah dalam arti luas.

Rencana pembangunan daerah harus disusun sesuai dengan kapasitas serta keadaan saat ini. Keadaan eksisting meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya permodalan, sarana serta prasarana pembangunan, teknologi, keinginan masyarakat setempat. Sebab dana maupun anggaran pembangunan yang ada terbatas, sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan relative besar, maka perlu:

1. Prioritas program pembangunan yang diusulkan prioritas program pembangunan harus didasarkan pada kriteria terukur.
2. Yang didukung oleh keterlibatan masyarakat guna mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Pendefinisian program pengembangan masyarakat yang terkena dampak adalah bentuk perencanaan top-down, atau sering disebut perencanaan top-down. Penarikan keikutsertaan warga desa ialah bentuk pemberdayaan masyarakat secara nyata serta terarah. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) adalah perwujudan kepedulian, kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan program yang diselenggarakan di wilayah ini.

Bentuk partisipasi dari masyarakat yaitu, bersedia menyerahkan tanahnya yang telah melalui pembangunan jalan desa maupun jaringan irigasi tanpa menuntut ganti rugi atas nilai tanah/tanah yang mereka kerjasamakan dalam pembangunan jalan desa tanpa bayaran dan lain-lain.⁵⁸

Menurut Arif Budiman, pembangunan ialah upaya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan dapat didefinisikan sebagai usaha terstruktur yang dilaksanakan oleh negara secara terus menerus untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Setiap orang (masyarakat) ataupun Negara (state) akan selalu berusaha guna bertahan hidup untuk saat ini dan seterusnya. Baik perkembangan maupun evolusi adalah proses dinamis guna mencapai kebaikan bersama. Proses kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan sektor perekonomian dan peningkatan tingkat.⁵⁹

2. Indikator Pembangunan Desa

Pembangunan didefinisikan sebagai perubahan ekonomi, sosial serta budaya secara terencana dengan menggunakan kebijakan serta program menuju arah yang diinginkan. Dengan ini, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) serta mikro (community/group).

pembangunan desa ialah seluruh kegiatan masyarakat (manusia dan pemerintah) di desa dalam mengembangkan diri, keluarga, masyarakat di lingkungan desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan serta keamanan, agama serta pemerintah yang di

⁵⁸*Ibid.*,h. 25

⁵⁹<http://repository.uin.suska.ac.id> Diakses Pada 1 Juli 2022 Pukul 23.21 WIB

laksanakan secara terstruktur serta membawa efek positif guna kemajuan desa.⁶⁰

1. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita ialah sebagian indikator ekonomi makro yang telah lama dipakai guna mengukur perkembangan ekonomi, baik sebagai persentase dari PDB maupun sebagai persentase dari PDB. Dari segi ekonomi, indikator ini adalah komponen kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur untuk menguraikan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat. Sepertinya pendapatan per kapita sudah menjadi indikator ekonomi makro yang tidak bisa diabaikan, meski mempunyai sejumlah kekurangan. Dengan demikian, peningkatan pendapatan nasional telah menjadi tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis tercapai karena adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

2. Struktur Ekonomi

Pertumbuhan pendapatan per kapita diharapkan dapat menguraikan perubahan struktur ekonomi serta strata sosial. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan per kapita, sektor produksi/industri dan jasa dalam penghasilan nasional mengalami peningkatan. Perkembangan sektor industri serta peningkatan tingkat gaji menaikkan kebutuhan barang-barang industri, kemudian perkembangan investasi serta peningkatan

⁶⁰Desmiwar, *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan*.Hlm. 44

angkatan kerja. Disisi lain, partisipasi pertanian dalam penghasilan nasional akan terus menurun.

3. Urbanisasi

Urbanisasi didefinisikan sebagai peningkatan skala masyarakat di daerah perkotaan relatif terhadap daerah pedesaan. Apabila peningkatan masyarakat di kota nol, maka urbanisasi tidak akan terjadi. Berdasarkan pengalaman industrialisasi di negara-negara Eropa Barat serta Amerika Utara, bobot relatif masyarakat perkotaan berbanding lurus dengan rasio industrialisasi. Berarti laju urbanisasi akan semakin tinggi seiring dengan pesatnya proses industrialisasi. Di negara-negara industri, kebanyakan masyarakat tinggal di daerah pedesaan. Menurut kejadian tersebut, urbanisasi dijadikan salah satu indikator pembangunan.

4. Angka Tabungan

Perkembangan sektor/industri manufaktur pada tahap industrialisasi membutuhkan investasi serta permodalan. Kapital finansial adalah faktor penting dalam proses industrialisasi masyarakat, seperti di Inggris kebanyakan di Eropa pada awal perkembangan kapitalisme, yang berlangsung setelah revolusi industri. Dalam masyarakat yang produktif, modal usaha ini bisa diperoleh dari tabungan swasta dan masyarakat.

5. Indeks Kualitas Hidup

IKH atau *Physical Quality of Life Index* (PQLI) digunakan sebagai alat ukur kesejahteraan serta kekayaan suatu masyarakat. Indeks ini terdiri dari indikator-indikator ekonomi makro yang tidak dapat menjelaskan kemakmuran rakyat ketika mengukur keberhasilan ekonomi. Seperti, penghasilan nasional negara dapat terus meningkat tanpa meningkatkan pembayaran asuransi sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan (1) harapan hidup pada usia satu tahun, (2) angka kematian bayi, (3) melek

huruf. Dalam indeks ini, rata-rata usia harapan hidup serta kematian anak dapat mengilustrasikan status gizi anak serta ibu, status kesehatan serta lingkungan keluarga, yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dapat mengilustrasikan jumlah penduduk yang memiliki akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini mengilustrasikan kemakmuran masyarakat, sebab status ekonomi keluarga yang tinggi mempengaruhi status pendidikan anggotanya. Indeks ini dianggap oleh para pengembangnya sebagai cara terbaik guna menilai kualitas manusia sebagai hasil pembangunan bersama dengan pendapatan per kapita sebagai ukuran kapasitas manusia.

6. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) telah mengembangkan indikator pembangunan lebih lanjut bersama dengan beberapa indikator yang ada. Gagasan utama dari indikator ini yaitu pentingnya memahami kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan harus fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pengertian ini, pembangunan dapat didefinisikan sebuah proses yang ditujukan guna menumbuhkan keputusan-keputusan yang dibuat oleh orang-orang. Hal ini dilakukan mengingat peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan setelah membuka berbagai pilhan dan peluang untuk secara bebas membentuk cara hidup manusia. Pembangunan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis berpengaruh dalam peningkatan martabat manusia. Dalam konteks ini, terdapat tiga aspek yang dianggap paling penting untuk pembangunan: umur panjang serta kesehatan, pendapatan serta pengembangan pengetahuan, serta menaikkan akses kehidupan yang lebih baik. Indeks

ini disusun dengan menggabungkan tiga komponen: (1) rata-rata harapan hidup saat lahir, (2) rata-rata tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA, (3) pendapatan per kapita yang dihitung sesuai dengan paritas daya beli. Pembangunan manusia erat kaitannya dengan pertumbuhan kemampuan manusia, yang dapat disimpulkan dalam pertumbuhan pengetahuan, sikap dan keterampilan, disamping kesehatan seluruh anggota keluarga dan orang-orang di sekitarnya.⁶¹

C. Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah desa diartikan sebagai pemerintahan terendah langsung di bawah kepala desa maupun lurah yang melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri serta terdiri atas kepala desa serta lembaga musyawarah desa

Pemerintah di definisikan sebagai sekelompok manusia yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, serta pengaturan pemerintahan sekaligus pengembangan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekereja. Pemerintahan dalam arti luas ialah seluruh kepentingan yang dilaksanakan oleh negara dalam melaksanakan kemakmuran masyarakat serta kepentingan negara sendiri, jadi tidak didefinisikan sebagai pemerintah yang hanya menyelenggarakan tugas eksekutif saja, tetapi termasuk tugas-tugas lainnya terkait legislatif serta yudikatif. Pemerintah desa ialah sebuah proses pemanduan upaya-upaya warga desa yang berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁶²

Pemerintah merupakan proses, metode, tindakan memerintah yang berlandaskan demokrasi, gubernur memegaang di daerah tingkat I, seluruhkepentingan yang dilaksanakan oleh negara dalam melaksanakan

⁶¹<http://profsyamsiah.wordpress.com> Diakses Pada 21 Juni 2022 Pukul 20.25 WIB

⁶²Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Pustaka Setia, 2015).

kemakmuran warga serta kebutuhan negara. Pemerintah ialah sebuah langkah bagaimana dinas umum dipimpin dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan penjelasan diatas bisa di tarik kesimpulan bahwa pemerintah yaitu badan yang melaksanakan kewenangan guna memerintah, sehingga memiliki kewenangan serta wibawa guna mengarahkan, membimbing, serta mengarahkan masyarakat pada pencapaian suatu tujuan.⁶³

Sedangkan desa ialah satuan warga hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berkuasa guna memerintah serta menangani kebutuhan warga desa setempat sesuai dengan asal-usul serta adat istiadat setempat yang dipercayai serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa maupun udik menurut pengertian secara menyeluruh ialah suatu aglomerasi kawasan di lingkungan perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa ialah pemisahan lingkungan administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Selain itu, desa ialah satuan lembaga pemerintah yang terendah, memiliki batas lingkungan tertentu, langsung dibawah kecamatan, serta termasuk satuan warga hukum yang memiliki hak melaksanakan rumah tangganya. Sesuai dengan asas desentralisasi atau otonomi daerah, mempunyai kekuasaan untuk memerintah serta mengatur keperluan masyarakat setempat berdsarkan asal usul serta adat istiadat setempat, yang dipercayai serta dihormati dalam sistem pemerintahan, menjadi negara kesatuan, Republik Indonesia.⁶⁴

Dari dua kata diatas yaitu pemerintahan serta desa dapat disimpulkan pemerintah desa ialah pelaksanaan kepentingan pemerintahan oleh pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa dalam memerintah serta mengurus kebutuhan warga desa setempat sesuai dengan asal-usul serta

⁶³Inu Kencana Syafi'i, *Etika Pemereintahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

⁶⁴Bambang Trisantoso Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Bandung: Fokus Media, 2011).

adat istiadat setempat yang dipercayai serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁵

Akan tetapi, desa apabila di jabarkan dalam penjelasan yang lebih luas lagi tidak sekedar mencakup ruang lingkup demografis maupun sekedar pembahasan luas daerah secara fisik saja, namun desa juga memiliki ciri sosial yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga mayoritas dari faktor sosial itulah menjadi pengaruh kemajuan desa, salah satu faktor sosial tersebut ialah pendidikan, terutama kualitas pendidikan agama islam masyarakat. Didalam sumber lain juga dikatakn bahwa pemerintahan desa adalah organisasi perpanjangan pemerintah pusat mempunyai kedudukan yang strategis dalam mengatur masyarakat desa/kelurahan serta kesuksesan pembangunan nasional. Disamping itu, pemerintahan desa ialah badan yang melaksanakan kewenangan mengatur dalam rangka melaksanakan kemakmuran warga yang berada dibawah camat maupun desa. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah ialah badan maupun organisasi yang melaksanakan kewenangan mengatur dalam rangka kegiatan maupun penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan guna memerintah, mengayomi, serta mensejahterakan warga desa yang pelaksanaannya oleh lembaga yang terendah langsung di bawah camat.

Dari berbagai penjelasan diatas dapat dilihat bahwa desa ialah elemen terkecil dalam struktur pemrintahan yang dipimpin oleh seorang kepala desa, dalam penyelenggaraan kinerjanya pemerintah desa memiliki kekuasaan yang dapat diatur sendiri oleh setiap masyarakat sebagai perangkat desa. Akan tetapi, kekuasaan tersebut tidak bebas tanpa ada batas, kekuasaan yang di pegang oleh pemerintah desa dalam mengeatur jalanya roda pemerintahan harus sesuai dengan melihat adat istiadat masyarakat yang ada selain itu juga karakter lokal warga juga harus tetap dijaga sebagai sebuah

⁶⁵ UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa, h. 3

karakter serta keistimewaan yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Pemerintah desa telah diketahui mempunyai hak dalam memerintah serta melaksanakan roda pemerintahan rumah tangganya sendiri, diantara beberapa kekuasaan desa antara lain:

- a. Melaksanakan kepentingan pemerintahan yang telah ada sesuai dengan hak asal usul desa
- b. Melaksanakan kepentingan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diberikan pengaturannya kepada desa, ialah kepentingan pemerintahan yang secara langsung dapat menaikkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota
- d. Kepentingan pemerintahan lainnya yang diberikan kepada desa.⁶⁶

Menurut A.W. Widjaja, pemerintah desa di definisikan sebagai pelaksana pemerintah desa ialah subsistem dari sistem pelaksanaan Negara, sehingga desa memiliki kekuasaan guna memerintah serta mengatur keperluan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada komite desa dan mengirimkan laporan kinerja kepada gubernur.⁶⁷

Pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ialah kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa serta perangkat desa bertugas menyelenggarakan sistem pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan serta pembinaan kemasyarakatan desa. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

⁶⁶<http://id.wikipedia.org/wiki/Desa> Diakses Pada 4 September 2022 Pukul 14.28 WIB

⁶⁷<http://repository.uma.ac.id> Diakses Pada 4 September 2022 Pukul 15.10 WIB

Desa juga mengartikan bahwa pemerintah desa yaitu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.⁶⁸

2. Indikator Pemerintah Desa

Pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ialah kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa serta perangkat desa bertugas menyelenggarakan sistem pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan serta pembinaan kemasyarakatan desa. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa juga mengartikan bahwa pemerintah desa yaitu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.⁶⁹

a. Kepala Desa

Menurut pasal 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebut bahwa:

1. Kepala desa memiliki tugas melaksanakan pemerintah desa, menyelenggarakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
 - b. Mengangkat serta memberhentikan perangkat desa

⁶⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁶⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- c. Memegang wewenang pengelolaan keuangan serta aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan serta belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman serta ketertiban masyarakat desa
- h. Membina serta meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya supaya tercapai perekonomian skala produktif sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan serta menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa guna mewakilinya sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan
- o. Menyelenggarakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri dari, sekretaris desa, penyelenggara lingkungan, penyelenggara teknis. Sedangkan tugas mereka ialah mendukung kepala desa dalam menyelenggarakan tugas serta kekuasaannya. Maka dari itu, mereka diangkat serta diberhentikan oleh kepala desa. Setelah itu, aparatur permukiman

bertanggungjawab kepada kepala permukiman atas pemenuhan tugas dan wewenangnya.

c. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Badan permusyawaratan desa mitra kepala desa dalam melaksanakan tugas serta kekuasaannya, keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa sesuai dengan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilaksanakan secara demokratis. Jumlah anggota BPD diputuskan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang serta paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan melihat lingkungan, perempuan, penduduk, serta keahlian keuangan desa. Sedangkan peresmian ditetapkan sesuai keputusan Bupati/Walikota.

Masa kerja BPD sama dengan Kepala Desa, yakni 6 tahun setelah itu dapat dipilih kembali selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Sedangkan tugas serta fungsi BPD ialah memusyawarahkan serta menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa, menampung serta menyalurkan keinginan masyarakat desa, serta melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, BPD berhak melakukan pengawasan terhadap perangkat desa, meminta keterangan tentang perangkat desa, menyampaikan pendapatnya terhadap pelaksanaan kewenangan desa, peningkatan masyarakat pedesaan dan penguatan masyarakat pedesaan dan biaya operasional guna penyelenggaraan tugas serta tugas anggaran pendapatan dan belanja desa.⁷⁰

⁷⁰ Moch Solekhtan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, ...Op. Cit. h. 76-77

D. Infrastruktur Desa

1. Pengertian Infrastruktur Desa

Pembangunan Infrastruktur ialah sebuah upaya maupun rangkaian usaha perkembangan serta transformasi yang dilaksanakan secara terstruktur guna mendirikan prasarana maupun segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terlaksananya sebuah proses pembangunan.⁷¹

Menurut Asnudin Andi, Infrastruktur pedesaan diartikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik serta menyediakan akses untuk pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi warga desa. Secara umum, pengertian infrastruktur seringkali dihubungkan dengan struktur fasilitas dasar sebagai kepentingan umum. Beberapa contoh infrastruktur dalam bentuk fisik adalah jalan, jalan tol, stadion, jembatan tinggi, jaringan listrik, bendungan, dan lain-lain. Lebih jauh, pentingnya infrastruktur bukan hanya soal fisik. Tetapi juga pelayanan non fisik seperti pelayanan masyarakat.⁷²

Menurut Grigg, sistem infrastruktur ialah penopang utama fungsi sistem sosial serta sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sistem infrastruktur dapat diartikan sebagai struktur dasar dan fasilitas, peralatan, struktur yang dibangun oleh sistem sosial serta sistem ekonomi masyarakat.⁷³

Sistem infrastruktur ialah penopang utama fungsi sistem sosial serta sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas maupun fasilitas dasar, peralatan, struktur yang dibangun serta dibutuhkan agar berfungsinya sistem sosial serta ekonomi masyarakat.⁷⁴

⁷¹Oktoriani, "Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau (Studi Komparatif Antara Desa Long Nawang Dan Desa Nawang Baru)," *Jurnal Pemerintahan Integratif* 4, no. 1 (2016). hlm. 35.

⁷²Asnudin, "Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat." Hlm. 293.

⁷³Peter F. Kaming, Komparasi Kecukupan Infrastruktur di Koridor Jawa, "*Jurnal Rekayasa Sipil* 6, no.1 (2017).hlm. 11.

⁷⁴R. J Kodoatie, *Manajemen Dan Rekayasa Infrastruktur*, hlm 92.

Pemerintah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2005 “Tentang Panitia Percepatan Penyediaan Infrastruktur” menguraikan beberapa jenis infrastruktur, yang penyediaanya diatur oleh pemerintah, antara lain: infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum serta pembuangan limbah, infrastruktur telematika, infrastruktur kelistrikan, serta infrastruktur transportasi minyak serta gas. Klasifikasi infrastruktur dapat digolongkan sebagai infrastruktur dasar karena dibutuhkan oleh masyarakat umum dan perlu diatur oleh pemerintah.⁷⁵

2. Indikator Infastruktur

Pembangunan Infrastruktur ialah sebuah upaya maupun rangkaian usaha perkembangan serta transformasi yang dilaksanakan secara terstruktur guna mendirikan prasarana maupun segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terlaksananya sebuah proses pembangunan.⁷⁶

Menurut Grigg, sistem infrastruktur ialah penopang utama fungsi sistem sosial serta sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sistem infrastruktur dapat diartikan sebagai struktur dasar dan fasilitas, peralatan, struktur yang dibangun oleh sistem sosial serta sistem ekonomi masyarakat.⁷⁷

- a. Merupakan infrastruktur yang dapat dikelola oleh masyarakat

Pembangunan infrastruktur mempunyai peran penting dalam menciptakan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya menuju

⁷⁵Rindang Bangun Prasetyo, “Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Indonesia,” *Jurnal Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Manajemen, Institut Pertanian Bogor* 2, no. 2 (2013), hlm. 225.

⁷⁶Oktoriani, “Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau (Studi Komparatif Antara Desa Long Nawang Dan Desa Nawang Baru),” *Jurnal Pemerintahan Integratif* 4, no. 1 (2016), hlm. 35.

⁷⁷Peter F. Kaming, Komparasi Kecukupan Infrastruktur di Koridor Jawa, “*Jurnal Rekayasa Sipil* 6, no.1 (2017), hlm. 11.

terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Melihat betapa pentingnya infrastruktur untuk kehidupan masyarakat, selain itu guna menaikkan akselerasi pembangunan maka cukup beralasan apabila setiap daerah dibangunnya infrastruktur yang memadai.

- b. Menjamin keberlangsungan fungsi infrastruktur yang dibangun

Pentingnya pembangunan infrastruktur di wilayah harus ditandai dengan nilai manfaat serta kegunaan yang diterima oleh masyarakat dengan cara yang berbeda, karena sangat wajar untuk menjaga perhatian pemerintah untuk pembangunan infrastruktur.

- c. Tidak mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial serta budaya

Pembangunan infastruktur yang sesuai dengan keperluan masyarakat dapat menaikkan pertukaran informasi serta kemudahan akses, konektivitas antar wilayah, antar daerah administrasi perdesaan dan antar wilayah administratif, bahkan akses yang baik ke ibukota kabupaten.⁷⁸

⁷⁸Sitti Faisaha, *Identifikasi Pembangunan Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan Wilayah Pedesaan di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu*, (Makassar :UIN ALAUDIN Makassar, 2020). Hal. 37-38

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Faisaha, Sitti. 2020. *Identifikasi Pembangunan Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan Wilayah Pedesaan di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu*, Makassar :UIN ALAUDIN Makassar.
- Rahmawati, A. 2020. *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten di Kabupaten Bone*, Makassar: UM Makassar.
- Hasibuan, Sayuti. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia: pendekatan non sekuler*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Supriyadi, A. Andang. 2019. *Airmanship*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utara.
- Mulyasa, E. 2013. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian Pendidikan Praktik*. Jakarta: Gama Press.
- Newman. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks.
- Muslim, Aziz. 2009. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Teras Kompleks Ri Gowok.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RAD*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Usman, Nurudin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Soetari, Endang. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Satria, Arif. 2011.*Menuju Desa 2030*. Bogor: Crestpent Press.
- Kondjaraningrat. 1976.*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Aulia Muhammad, Angki. 2013.*Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Desmiwar, Devi. 2019.*Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan*. Riau: UIN Syarif Kasim.
- Miles. 1992.*Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nawawi Hadari. 2003.*Perencanaan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rivai Veithzal. 2004.*Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perubahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Vardiansyah Danil. 2008.*Filsafat Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Indeks.
- Roudhonah. 2007.*Ilmu Komunikasi*. Jakarta: UIN Press.
- Efendy Onong Uchjana. 1998.*Ilmu Komunikasi dan Praktek*. Bandung: Remadja Karya.
- Widjaja. H.A.W. 2000.*Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sumber Jurnal dan Skripsi

- Kaming, Peter F. 2017. Komparasi Kecukupan Infrastruktur di Koridor Jawa, "*Jurnal Rekayasa Sipil* 6, no.1.

- Rifyal, Zuhdi Gultom 2020. "Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 6.
- Arischa, Suci. 2019. "Analisis Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Administrasi* 6, no. 1.
- Asnudin, Andi. 2009. "Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat." *Jurnal SmarTek* 7, no. 4.
- Firdaus, Muhammad. 2009. "Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 2, no. 2.
- Indah Pratiwi, Nuning. 2017. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2.
- Kanaha, Ibnu. 2019. "Implementasi Program Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Tolonuo Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara." *Jurnal of Publik Administration and Local Governance* 3, no. 2.
- Kurniawan, Wahyu. 2019. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donal Van Meter Dan Carl Van Horn." *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMAP)* 1, no. 4 (2019): 70.
- Maryaningsih, Novi. 2014. "Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 17, no. 1.
- Oktoriani. 2016. "Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau (Studi Komparatif Antara Desa Long Nawang Dan Desa Nawang Baru)." *Jurnal Pemerintahan Integratif* 4, no. 1: 35.

- Prasetyo, Rindang Bangun. 2013. "Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Indonesia." *Jurnal Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Manajemen, Institut Pertanian Bogor 2*, no. 2: 225.
- Rijali, Ahmad. 2018. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33.
- Afni, Wilda. 2013. "Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis." UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Kurniyati, Yuni. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara." UIN Raden Intan Lampung.
- Puspa, Rinanti Aditya. 2019. "Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Sumur Gede Kecamatan Godong Kabupaten Gerobogan." Universitas Negeri Semarang.
- Sari, Wilda. 2020. "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang." Universitas Muhammadiyah Makasar.

Sumber Peraturan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. "Pasal 1 Ayat 9," n.d.

Sumber Online

<http://eprints.ums.ac.id> diakses pada 4 November 2021 pukul 19.43 WIB

<http://psikologi.fisip-unmul.ac.id> diakses pada 5 November 2021 pukul 21.25 WIB

<http://digilib.iain-jember.ac.id> diakses pada 6 November 2021 pukul 06.21 WIB

<http://eprints.peradaban.ac.id> diakses pada 6 November 2021 pukul 06.20 WIB

<http://eprints.uny.ac.id> diakses pada 6 Desember 2021 pukul 20.50 WIB

<http://eprints.polsri.ac.id> Diakses Pada 20 Juni 2022 Pukul 13.42 WIB

<http://www.duniapengertian.com> Diakses Pada 20 Juni 2022 Pukul 15.33 WIB

<http://bappeda.bulelengkab.go.id> Diakses Pada 19 Juni 2022 Pukul 22.23 WIB

<http://profsyamsiah.wordpress.com> Diakses Pada 21 Juni 2022 Pukul 20.25 WIB

Fauzi Kurniawan, “Beberapa Teori Tentang Pembangunan”, <http://beberapa-teori-tentang-pembangunan-dan.html> post 29-03-2016.

Sumber Artikel

Rachbini, J Didik. “Kebijakan Infrastruktur Kritis Pada Implementasi.” *Artikel*, 2016.

Sumber Wawancara

Hasil wawancara oleh Bapak Taryono Pada 15 Juli 2021

Hasil wawancara oleh Bapak Madian Pada 20 Juli 2021

Hasil wawancara oleh Bapak Taryono Pada 25 Juli 2021

Hasil Wawancara Kepala Desa Pekurun Bapak Madian, Pada 14 Maret 2022

Hasil Wawancara Bapak Madian Kepala Desa Pekurun, Pada 14 Maret 2022

Hasil Wawancara Sekretaris Desa Bapak Taryono, Pada 14 Maret 2022

Hasil Wawancara Kasi Keuangan Ibu Ayu Wulandari, Pada 14 Maret 2022

Hasil Wawancara Kasi Pembangunan Ibu Monica Eriana,S.Kom, Pada 14 Maret 2022

Hasil Wawancara Warga Desa Pekurun Bapak M. Ilyas, Pada 15 Maret 2022

Sumber Lain

Data Balai Desa Pekurun, 14 Maret 2022

